

**LITERASI DIGITAL DALAM PENGGUNAAN SISTEM
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**SALSABILA PUTRI ZAHRAN
NIM. 07011281924262**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**LITERASI DIGITAL DALAM PENGGUNAAN SISTEM
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALEMBANG**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:

SALSABILA PUTRI ZAHNAN

NIM. 07011281924262

Pembimbing,

Ermanovida, S.Sos., M.Si

NIP. 196911191998032001

Tanda Tangan



Tanggal

7/7/2023

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**


Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

LITERASI DIGITAL DALAM PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Oleh:

SALSABILA PUTRI ZAHRAN

NIM.07011281924262

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada Tanggal 20 Juli 2023**

Pembimbing :

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



Penguji :

1. Drs. Madianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



2. Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197603092008011009



Mengetahui,



Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salsabila Putri Zahran
NIM : 07011281924262
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul " LITERASI DIGITAL DALAM PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG" ini adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Indralaya, 17 Juli 2023



Salsabila Putri Zahran
NIM. 07011281924262

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hatiku Tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

-Umar Bin Khattab-

Atas Ridho Allah SWT,

Skripsi ini saya Persembahkan Kepada:

1. Kedua orang tua saya
2. Keluarga saya
3. Teman-teman, sahabat dan orang yang saya cinta
4. Seluruh dosen dan staf Fisip Universitas Sriwijaya
5. Kampus yang saya banggakan, Universitas Sriwijaya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecakapan pegawai negeri sipil dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) atau Literasi Digital penggunaan SIPD di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Palembang. SIPD merupakan suatu sistem yang dapat memberi dan mengolah data terkait pembangunan daerah sehingga dapat menjadi informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah telah diatur dalam Permendagri No.70/2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Jenis Penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan sumber data dari observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Adapun analisis data yang dilakukan yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak tiga orang yang merupakan Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini menggunakan teori literasi digital yang terdiri dari empat aspek yakni *Underpinnings, Background Knowledge, Central Competences, dan attituded and perspective*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital pegawai negeri sipil di Sekretariat DPRD Kota Palembang secara keseluruhan masih kurang baik. Maka dari itu saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah diadakannya bimbingan teknologi yang rutin kepada pegawai yang dianggap kurang cakap dalam menggunakan SIPD serta melakukan sosialisasi apabila terjadi perubahan-perubahan baru terkait penggunaan SIPD.

Kata Kunci: Literasi Digital, SIPD, Sekretariat DPRD Kota Palembang

Pembimbing



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Indralaya, Juli 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

This research to know the competence of civil government officials in the use of Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) or digital literacy using SIPD at Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) of Palembang City. SIPD is a system that can provide and process data related to area development so that it can be information used as a material of consideration for decision making. SIPD has been regulated in the Permendagri No. 70/2019 about Sistem Informasi Pemerintah Daerah. The type of research used is qualitative with data sources from observation, Deep interview, and documentation. Data analysis is done with data collection, reduction of data, data presentation, as well as withdrawals. The number of informants in this research is three person who is civil servants The study uses the theory of digital literature that consists of four aspects: underpinnings, background knowledge, central competencies, Attitude and Perspective. The result showed that digital literacy civil servants at Sekretariat DPRD of Palembang City overall was less than satisfactory. Therefore, the recommended advice in this study is to conduct routine technological guidance to employees who are considered less capable in using SIPD and to socialize when new changes related to the use of SIPD.

Keywords: *Digital Literacy, SIPD, Sekretariat DPRD Of Palembang City*

Advisor

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Indralaya, July 2023
Chairman Of Public Administration Department
Faculty Of Social Political Science
Sriwijaya University

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “LITERASI DIGITAL DALAM PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG” dengan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini membahas permasalahan isu yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital khususnya pada instansi pemerintah, Penulisan skripsi dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian skripsi ini merupakan analisis tentang kemampuan atau kecakapan pegawai (dalam hal ini literasi digital) menggunakan SIPD pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dengan menggunakan teori literasi digital dari David Bawden.

Penulis berharap adanya kritik, saran, ataupun usulan-usulan yang membangun guna melengkapi ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini karena penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta pengarahan dari berbagai pihak yang terkait untuk mendukung penulisan skripsi ini. Maka dari itu, itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kesabaran, kekuatan dan kegigihan kepada penulis.
2. Ibu Maimunah dan Ayah Khairul Ismail yang telah memberikan do'a, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., IPU., ASEAN.Eng., selaku Rektor Universitas Sriwijaya
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Azhar, SH., M,Sc., LL.M., LL.D. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. M.Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Kepala Jurusan Ilmu Administrasi

7. Ibu Meiliya Fitryani, S.Kom yang telah memberikan nasehat, bantuan, serta bimbingan kepada saya.
8. Ibu Dilah Purwaningsih, S.H., selaku Kasubag Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Palembang
9. Ibu Adisti Amaliah., S.E., M.Si., selaku Kasubag Perlengkapan dan Asset Sekretariat DPRD Kota Palembang
10. Yuni Maria, S.E., M.Si., selaku Kasubag Perencanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kota Palembang
11. Arya Kusuma (Ayi), yang pernah menjadi *support system* selama penulisan skripsi ini.
12. Ketiga adik saya (Naila Putri Zakirah, M. Nabil Habibie, dan Alya Kareem) yang menjadi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Keluarga saya (Kakek, Nenek, tante Khoirunnisa, Om Marwah, dll) yang telah memberi dukungan dan do'a terbaik kepada penulis.
14. Kak Cristian Renaldi Simanjuntak (Kak Nando), yang memberi motivasi dan semangat kepada saya dalam penulisan skripsi ini.
15. Bestiqoeh (Ayu Dwi Putri, Bunga Aprilia, Grecia Adiarti Hasugian, Rizky Amalia) yang telah memberi masukan dan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
16. Cakiah's Club (Zakiyah, Paradita Regina Titania, Nabila, Putri Ummusholiha, Fatia Rizki Putri, Niki Nauli Tua Pasaribu, Nadia Rahmawati, Yenni Puspita Sari) yang banyak memberi arahan, serta saran membangun kepada penulis.

Palembang, 7 Juli 2023

Penulis

Salsabila Putri Zahran

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penulisan.....	10
1.4 Manfaat Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

2.1 Literasi Digital.....	12
2.2 Model-Model Literasi Digital	14
2.3 Electronic Government (E-Gov)	22
2.4 Sistem Informasi Pemerintah Daerah	27

2.5	Teori Literasi Digital yang digunakan	29
2.6	Penelitian Terdahulu	32
2.7	Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III METODE PENELITIAN		38
3.1	Jenis Penelitian	38
3.2	Definisi Konsep	39
3.3	Fokus Penelitian	39
3.4	Informan Penelitian	41
3.5	Jenis dan Sumber Data.....	41
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.7	Teknik Keabsahan Data	43
3.8	Teknik Analisis Data	44
3.9	Jadwal Penelitian	46
3.10	Sistematika Penulisan	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		49
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.2	Deskripsi Informan Penelitian	61
4.3	Hasil Penelitian	62
4.3.1	<i>Underpinnings</i> (Kemampuan Dasar Literasi Digital)	63
4.3.2	<i>Background Knowledge</i> (Latar Belakang Pengetahuan).....	71
4.3.3	<i>Central Competence</i> (Kompetensi Pusat dalam Penggunaan SIPD)	80
4.3.4	<i>Attitudes and Perpective</i> (Sikap dan Perspektif Pengguna Informasi)	86
4.4	Pembahasan	93

BAB V PENUTUP	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran-Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	102

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang telah menggunakan atau terhubung dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah.....	5
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3. Fokus Penelitian.....	40
Tabel 4. Matriks Hasil Penelitian	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran	37
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Palembang.....	51
Gambar 3. SPP dan SPM Gaji Karyawan	65
Gambar 4. SIPD Akuntansi dan Pelaporan	66
Gambar 5. Standar Satuan Harga (SSH) yang tidak lengkap.....	68
Gambar 6. RKA dan DPA Anggaran 2023	70
Gambar 7. Hasil Screenshoot penggunaan SIPD Kasubag Perlengkapan dengan pihak BPKAD	77
Gambar 8. Sosialisasi SIPD melalui Youtube.....	79
Gambar 9. Bentuk SPM dan SPP Digital.....	82
Gambar 10. Dokumen fisik SPM dan SPP.....	82
Gambar 11 Tenaga Honorer yang melakukan pengentryan data SIPD	89

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

APIJ	: Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia
ASN	: Aparatur Sipil Negara
KOMINFO	: Kementerian Komunikasi Dan Informatika
NIP	: Nomor Induk Pegawai
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PERMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam negeri
SIPD	: Sistem Informasi Pemerintah Daerah

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi pemerintah daerah secara cepat dan tepat merupakan penyesuaian pemerintah terhadap arus perkembangan zaman. Adanya perkembangan teknologi yang semakin maju tentunya membawa perubahan baru di seluruh dunia. Kemajuan teknologi ini telah menghilangkan batasan-batasan teritorial antar negara dan menghadirkan kemudahan untuk berbagi informasi antar satu negara dengan negara lain. Masyarakat saat ini dapat mengakses berbagai jenis informasi secara mudah, karena pencarian informasi tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Transformasi digital tidak hanya dilakukan oleh organisasi swasta, namun pada tingkatan individu dan organisasi publik pun melakukan transformasi digitalisasi. Data Pengguna internet di Indonesia menunjukkan bahwa pada kuartal 1 tahun 2022 mencapai hingga 210 juta jiwa atau sekitar 77,02% dari semua penduduk Indonesia yang menggunakan internet (berdasarkan hasil survey oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet atau APJI). Data ini sekaligus menunjukkan bahwa adanya kenaikan sekitar 50% pengguna internet jika dibandingkan dari tahun 2018. Artinya, seiring berjalannya waktu akan ada peningkatan dalam penggunaan internet sebagai upaya untuk mewujudkan transformasi digital. Saat ini, indeks literasi digital Indonesia pada tahun 2021 baru berada di level 3,49 dari nilai maksimum 5,00 (berdasarkan laporan status literasi digital dari Kominfo.go.id, 2021). Adanya tuntutan era digital saat ini

menjadi pendorong dibutuhkan sumber daya manusia yang wajib memiliki keterampilan khususnya dalam penggunaan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital tidak terlepas dari literasi digital. Menurut Paul Gilster dalam A'Yuni (2015:7) memaknai literasi digital sebagai kemampuan seseorang untuk dapat memahami serta menggunakan informasi dari berbagai sumber yang kemudian diperoleh melalui internet. David Bawden (2001) mengatakan bahwa literasi komputer dan literasi informasi sebagai awal dari munculnya literasi digital. Sementara Belshaw (2011) memaknai literasi digital sebagai sebuah ilmu dan kompetensi yang dimiliki seseorang agar dapat menggunakan teknologi digital. Jadi dapat disimpulkan bahwa literasi digital merupakan keterampilan atau kecakapan individu dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Perkembangan digitalisasi ini merupakan peluang sekaligus tantangan baru yang harus diperhatikan secara bersama. Berkembangnya teknologi digital dapat dirasakan oleh seluruh orang, baik itu masyarakat, sektor swasta, maupun sektor pemerintahan. Ada banyak sistem yang digunakan dalam mendukung proses dan kegiatan pemerintah seperti E-Lapkin, E-Procurement, Simda, SIPD, dll. E-Lapkin Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019, *Electronic* Laporan Kinerja atau E-Lapkin merupakan aplikasi yang berbasis website, digunakan oleh PNS sebagai alat laporan kinerja untuk menginput laporan kinerja individu tahunan oleh instansi pemerintah. *E- Procurement (Electronic Procurement)* adalah suatu sistem yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam internet, digunakan oleh pemerintah digunakan untuk lelang, pengadaan barang atau jasa. Ada juga sistem informasi lainnya yang digunakan oleh pemerintah, seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau Simda yang dapat membantu manajemen serta menyajikan

informasi melalui pengumpulan data, pengolahan serta evaluasi data agar menjadi informasi yang bernilai sehingga pada akhirnya bisa dilakukan pengambilan keputusan, yang dimana informasi ini dapat mendukung fungsi operasi manajemen (Machmud, Rizan. 2013). Sementara SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) merupakan suatu sistem guna untuk melakukan dokumentasi, dan mengelola data pembangunan daerah sehingga menjadi informasi yang bisa disajikan kepada publik dan diperkirakan bisa digunakan dalam pengambilan keputusan (Sedianingsih et al, 2014). SIPD ini juga menyimpan informasi keuangan dan pemerintah daerah yang saling terhubung dengan pemerintah daerah lainnya. Jadi, keterhubungan data-data dan informasi yang ada di dalam SIPD tidak hanya memiliki hubungan vertikal (pemerintah pusat dan pemerintah daerah), namun juga memiliki hubungan yang horizontal (antar pemerintah daerah satu dengan yang lain).

Fungsi lain SIPD adalah untuk menyimpan data yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah, data sistem keuangan daerah, serta data pemerintah lainnya seperti sistem pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah lainnya (Nasution & Nurwani, 2021). SIPD ini sebagai *support system* digunakan untuk merencanakan program dan kegiatan lainnya, serta sebagai bahan pertimbangan evaluasi pembangunan daerah agar lebih secara efektif dan efisien. SIPD ini juga mendukung berbagai perpaduan pemanfaatan data yang berkaitan dengan perkembangan pembangunan pada daerah masing-masing, dan tentunya melalui instansi pemerintah. Adapun menurut Sudaianing & Seputra (2019), 2 hal penting yang dapat disampaikan terkait Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ini, yakni:

1. Pentingnya mengelola SIPD secara baik guna mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan hasil yang lebih berkualitas
2. SIPD memiliki hasil yang kritis dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, guna mendapatkan hasil terhadap pemerintah yang lebih responsif, mengupayakan peningkatan demokrasi dan partisipasi dalam perencanaan daerah, serta mendorong publik (baik pemerintah maupun masyarakat) di setiap daerah.

SIPD ini juga merupakan perwujudan pemerintah dalam menjalankan amanat yang sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 391 ayat 1 tentang Pemerintah Daerah, bahwa setiap Pemda atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintah Daerah secara cepat dan tepat. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini. Kementerian dalam negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagai payung hukum pelaksanaan teknis dalam menggunakan sistem informasi pemerintah daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat 1, yakni terkait ruang lingkup Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang ada dalam SIPD ini yakni terdiri atas;

- a. Informasi Pembangunan Daerah; dan
- b. Informasi Keuangan Daerah.
- c. Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya

Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) telah diterapkan di beberapa instansi pemerintahan daerah, salah satunya Sumatera Selatan. Penerapan SIPD ini juga masih tergolong baru, tepatnya baru dilaksanakan pada awal Januari tahun 2021. Penggunaan SIPD tepatnya pada tanggal 15 Januari 2021, ada sekitar 73,62% atau

sekitar 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) Pemerintah Daerah yang telah menggunakan SIPD. Artinya, masih ada 26,38% Pemerintah Daerah di Indonesia yang belum menggunakan SIPD. Pada tahun Anggaran 2021, terdapat ada sekitar 202 pemda atau pemerintah daerah yang mengalami perbedaan pemahaman unit dan sub unit organisasi dalam SIP sehingga munculnya masalah penyusunan RAK (Rencana Anggaran Kas) serta terdapat 98 (Sembilan puluh delapan) Pemda atau Pemerintah Daerah yang belum melakukan pemutakhiran referensi atas kode rekening, program, kegiatan dan sub kegiatan secara menyeluruh pada tahapan perencanaan dan penganggaran dalam SIPD (Sumber: SE Menteri Dalam Negeri No. 903/145/SJ). Artinya, penerapan teknologi seperti SIPD dalam ruang lingkup Pemerintahan masih banyak terjadi kendala.

Salah satu Pemerintah Daerah yang telah menggunakan SIPD, seperti Sumatera Selatan. Adapun beberapa instansi tingkat Kota atau Kabupaten di Sumatera Selatan yang telah terintegrasi SIPD yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yang telah menggunakan atau Terhubung dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah

No.	Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan	Terhubung/Belum
1	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Telah Terhubung SIPD
2	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Telah Terhubung SIPD
3	Kabupaten Muara Enim	Telah Terhubung SIPD

4	Kabupaten Lahat	Belum Terhubung SIPD
5	Kabupaten Musi Rawas	Telah Terhubung SIPD
6	Kabupaten Musi Banyuasin	Telah Terhubung SIPD
7	Kabupaten Banyuasin	Telah Terhubung SIPD
8	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Telah Terhubung SIPD
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Telah Terhubung SIPD
10	Kabupaten Ogan Ilir	Telah Terhubung SIPD
11	Kabupaten Empat Lawang	Telah Terhubung SIPD
12	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Telah Terhubung SIPD
13	Kabupaten Musi Rawas Utara	Telah Terhubung SIPD
14	Kota Palembang	Telah Terhubung SIPD
15	Kota Pagaralam	Telah Terhubung SIPD
16	Kota Lubuk Linggau	Telah Terhubung SIPD
17	Kota Prabumulih	Belum Terhubung SIPD

Sumber: Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

Data diatas menunjukkan bahwa penggunaan SIPD di Sumatera selatan belum sepenuhnya diterapkan oleh semua Kota dan organisasi perangkat daerah (OPD). Bisa kita lihat dari bahwa SIPD Pemerintah Daerah untuk kabupaten atau kota di Sumatera

Selatan masih ada yang belum terintegrasi. Dari data tersebut untuk wilayah Sumatera Selatan, ada dua kota yang belum terintegrasi ke SIPD, yakni kota Lahat dan kota Prabumulih. Hal ini karena dalam pelaksanaannya, peralihan dari sistem manual ke digital untuk pengelolaan administrasi pemerintah tentunya membutuhkan *planning* dan persiapan yang matang.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang salah satu contoh instansi di Kota Palembang yang telah menggunakan SIPD. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, untuk kota Palembang sendiri sudah terintegrasi atau terhubung ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah. SIPD ini merupakan pembaharuan dari sistem yang dipakai pemerintah sebelumnya, yakni Simda khususnya dalam tata kelola keuangan yang berkaitan untuk pembangunan daerah. Kebijakannya pun baru disahkan pada tahun 2019, dan baru diimplementasikan pada tahun 2021 yang artinya SIPD ini masih sangat baru dalam penerapannya di instansi pemerintahan daerah, khususnya di Sumatera. Namun fakta di lapangan terhadap penggunaan SIPD salah satu di instansi pemerintah yakni Sekretariat DPRD Kota Palembang, terkait masalah penginputan data yang tidak seluruh pegawai mampu mengoperasikannya. Hanya ada beberapa selaku admin untuk melakukan penginputan data keuangan SIPD, dimana admin tersebut merupakan tenaga honor/tenaga supporting, bukan pegawai PNS. Padahal seharusnya, penggunaan SIPD itu menjadi tugas dan kewajiban PNS, karena akun yang digunakan pada saat *login* harus memakai NIP PNS. Artinya, penggunaan SIPD oleh pegawai atau aparat pemerintah saat ini masih menjadi *hot issues*.

Hasil penelitian dari Intan Ladyta, Yosi Handayani dan Roza Puspita dengan judul “Literasi Digital dalam Penggunaan Sistem Informasi Pengendalian Tagihan (SINTAG)” menunjukkan bahwa literasi digital dalam penggunaan Sistem Informasi Pengendalian Tagihan masih memiliki beberapa kendala, seperti kesalahan dalam penginputan data, kesalahan dalam penetikkan nominal angka yang dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat dan tidak relevan bagi bendahara pengeluaran. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pembahasan terkait literasi digital dalam penggunaan sistem informasi khususnya di ruang lingkup pemerintahan. Sementara perbedaannya, penelitian ini masalah terkait literasi digital dalam penggunaan SIPD menggunakan teori dari David Bawden (2001), sementara penelitian sebelumnya membahas literasi digital dalam penggunaan SINTAG menggunakan teori Sistem informasi dari Fauzi (2017).

Penelitian Nadya Citta (2020) dengan judul “Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Manado (Studi di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado)” menunjukkan hasil bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Manado belum terlaksana secara baik karena adanya beberapa kendala seperti banyaknya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tidak dapat melakukan input data secara tepat waktu sesuai dengan yang ditentukan oleh Bappelitbangda. Akibatnya, banyaknya keterlambatan saat proses input data perencanaan. Sumber daya manusia yang kurang serta bimtek atau bimbingan teknis yang kurang maksimal juga menyebabkan banyak pegawai yang tidak dapat mengoperasikan SIPD. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah permasalahan yang sama penggunaan SIPD yang belum terlaksana baik yang salah satunya disebabkan oleh pengguna SIPD atau pegawai itu sendiri. Adapun perbedaan

penelitian yakni teori yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya menggunakan teori implementasi dari George Edward III, maka penelitian ini menggunakan teori literasi digital dari David Bawden.

Penelitian dari Muhammad Irfan Nasution dan Nurwan (2021) dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Medan” menunjukkan hasil bahwa penerapan SIPD di Kota Medan masih kurang efisien, serta masih dibutuhkannya bimbingan teknis karena banyak OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang belum terbiasa menggunakan SIPD. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah permasalahan yang sama terkait penggunaan SIPD. Adapun perbedaan penelitian yakni teori yang digunakan. Jika penelitian sebelumnya menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn, maka penelitian ini menggunakan teori literasi digital dari David Bawden.

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa hal yang menjadi latar belakang penelitian yakni:

1. Penggunaan SIPD yang masih baru menjadi hot issue karena masih banyak kendala seperti 98 Pemerintah Daerah belum melakukan pemutakhiran referensi atas program, kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening secara menyeluruh pada tahapan perencanaan dan penganggaran dalam SIPD. Artinya penggunaan SIPD oleh pegawai Pemerintah masih menjadi kendala.
2. Berdasarkan penelitian dari Muhammad Irfan Nasution dan Nurwan (2021) dengan judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Kota Medan”

menunjukkan hasil bahwa penerapan SIPD di Kota Medan masih kurang efisien, serta masih dibutuhkannya bimbingan teknis karena banyak SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang belum terbiasa menggunakan SIPD.

3. Salah satu Instansi Pemerintah Daerah, seperti DPRD Kota Palembang yang ditemukan masalah adanya ambil alih tugas yang seharusnya menjadi kewajiban Pegawai terkait penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Penginputan data masih dibantu oleh tenaga honorer yang jelas tidak memiliki NIP dan jikapun terjadi kesalahan, maka sulit akan mendapatkan pertanggungjawabannya.

Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian untuk melihat kemampuan pegawai dalam penggunaan SIPD, dengan judul **“Literasi Digital Dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan yakni “Bagaimana literasi digital dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang?”

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan Penulisan ini untuk mengetahui, memahami, dan mengidentifikasi Literasi Digital dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat Penulisan ini yakni:

1. Manfaat Teoritis, Penulisan ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu administrasi publik serta sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Literasi Digital dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
2. Manfaat Praktis, yakni memberi masukan ataupun saran kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang terkait Literasi Digital dalam Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Nova Catur, and Ika Krismayani. 2018. *Kemampuan Literasi Digital Mahasiswa S-1 Angkatan 2018 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro*.
- Alfani, Dela, and Juliana Nasution. 2022. *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Pendidikan Tembusai* 6 Nomor 1: 4036–43.
- Amara, Laisa, Shintia Rahayu Safitri, and Naila Tunnada. 2021. *Digital Literacy and Digital Inclusion: Information Policy and the Public Library*. 9: 92–105.
- Ana Irhandayaningsih. 2021. *Pengukuran Literasi Digital Pada Peserta Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi COVID-19*: *E-Journal Undip*. 4 (2) : 231-240
- Arief, Verdico, and Ade M. Yuardani. 2018. *Efektivitas Penerapan Konsep E-Government Dalam Bentuk Aplikasi Elektronik Kelurahan Pada Kelurahan SungaiBangkong Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat*. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*: 155–63.
- Barat, Jawa, Masjid Al-muttaqin, Jawa Barat, and West Java. 2019. *Literasi Digital Melalui Aplikasi Microsoft Access Sebagai Komunikasi Bisnis Terhadap Perubahan Perilaku Konsumen (Studi Pada Warga Jatikramat , Bekasi , Jawa Barat)*. 2(1): 166–73.
- Bawden, David. 2001. *Information and Digital Literacies A Review of Concepts*. *Journal of Documentation*, 57(2).
- Brown, David. 2005. *Electronic Government and Public Administration*. *International Review of Administrative Science*. 71(2): 241-254
- Hanan, Ahmad, Edi Firman, dkk. 2022. *Investigating English Teachers Digital Literacy In The Context Of Online Learning*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JSIP)*. 6(3): 10625–29.
- Handayani, Putu Wuri, and Nurulita Prihasti Kardia. 2012. *Analisis Tingkat Implementasi E-Government Pada Level Kementerian Indonesia Berdasarkan Framework Deloitte*

- & *Touche*. *Jurnal Sistem Informasi* 6(2): 134.
- Jang Moonkyoung, Milla Aavakare, dkk. 2020. *The Influence of Digital Literacy and Information Literacy on Intentions to Use Digital Technology for Learning - Comparative Study in Korea and Finland*.
- Karima, Mutiara, and Rochman Hadi Mustofa. 2022. *Penerapan Literasi Digital Melalui LSM Pada Tingkat Sekolah Dasar*. *Jurnal Pendidikan Islam*. 9(1): 83-93
- Lankshear, Colin., Knobel, Michele. 2008. *Digital Literacies: Concepts, Policies, and Practices*. New York: Peter Lang Publishing, Inc. Lazuardhi
- Maharani, Dewi. 2021. *Keberhasilan Kompetensi Literasi Digital Sebagai Tolok Ukur Soft Skills Mahasiswa Lulusan Kearsipan*. *Jurnal Dokumentasi dan Informasi*. 42(1): 131–38.
- Marchionini, G., 1995, *Information Seeking in Electronic Environments*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Mega, Iful Rahmawati. 2022. *Learnes Digital Literacy In The Online Learning During Covid-19*. 10(2): 699–706.
- Mirza, Tony. 2018. *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pegawai Daerah (SIPD) Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 (Studi pada BPKPSDM Kota Palembang)*.
- Murray, Meg Coffin, and Jorge Pérez. 2014. “*Unraveling the Digital Literacy Paradox : How Higher Education Fails at the Fourth Literacy*”. *Science and Information Technology*.11: 85–100.
- Mutiara Rumata, Vience, Dimas Aditya Nugraha. 2020. *Rendahnya Tingkat Perilaku Digital ASN Kementerian Kominfo : Survei Literasi Digital Pada Instansi Pemerintah*. *Jurnal Studi Komunikasi*. 4(2): 467–84.
- Nasution, Muhammad Irfan. 2021. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9(2): 109-116.
- Nurjanah, Ervina, Agus Rusmana, and Andri Yanto. 2017. *Hubungan Literasi Digital*

- dengan Kualitas Penggunaan E-Resources*. *Lentera Pustaka*.3(2): 117–40.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019.
- Reddy, Pritika, Bibhya Sharma, and Kaylash Chaudhary. 2020. *Digital Literacy*. 11(2): 65–94.
- Restianty, Ajani. 2018. *Literasi Digital: Sebuah Tantangan Baru Dalam Literasi Media*. *Jurnal Kehumasan*. 1(1): 72-87.
- Sahilanada, Zhara Nicken. 2021. *Kemampuan Literasi Digital Anggota Pers Mahasiswa Hayamwuruk Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Dalam Merespon Hoax*. 5(1): 89–99.
- Saripudin, S et al. 2019. “*Digital Literacy Qualitative Analysis in Vocational Teachers* : 262–70.
- Sitepu, Yovita Sabarina, and Mickhael Rajagukguk. 2022. *Digital Literacy Competence Survey in Medan City*. *Jurnal ASPIKOM* 7(1): 173-189.
- Suganda, Jeni. 2019. *Kemampuan Literasi Digital di Kalangan Ibu-Ibu Muda Surabaya Terkait Informasi, Terkait, and Imunisasi Measles*. 2(6) : 1–17.
- Sukarjo, Septian Pramitra, and Kharisma Nasionalita. 2022. *Kesenjangan Digital Antara Generasi Y Dan Z Pada Guru Sekolah Menengah Atas Kota Bandung Dalam Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19*. 9(2): 992–1007.
- Sumiati, E T I. 2020. “*Manfaat Literasi Digital Bagi Masyarakat dan Sektor Pendidikan pada saat Pandemic Covid-19*”. 3(2): 65-80.
- Sundah, Pierre Mauritz et al. 2020. *Digital Literacy: Implementation of Googleclassroom to Improve the Ability of Educators*. *Jurnal Sinergitas PKM dan CSR*. 4(3): 273–81.
- Trofi, Akhirfiarta, Brilian. 2020. *Literasi Digital Pada Pegawai RSUD Dr. Soetomo*.
- Ulrica Lfstedt. 2005. *Assesment of Current Research and Some Proposals for Future Directions*. *International Journal of Public Information Systems*. 1(2): 39-52